

Pendalaman RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Perspektif Tata Kelola Wilayah, Penguatan Institusi dan Potensi Pembiayaan Inovatif



Isu Kontekstual Wilayah

Peran Strategis Jawa Tengah dalam Pengembangan Wilayah

- Jawa Tengah berfungsi sebagai **penopang utama sektor pangan, industri, dan pariwisata nasional**, sehingga membutuhkan kelembagaan wilayah pengembangan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan.
- **Struktur kelembagaan wilayah pengembangan perlu ditingkatkan untuk mendukung perencanaan tata ruang, aglomerasi rantai pasok, dan kebijakan investasi** yang lebih terintegrasi.

Tantangan Kelembagaan

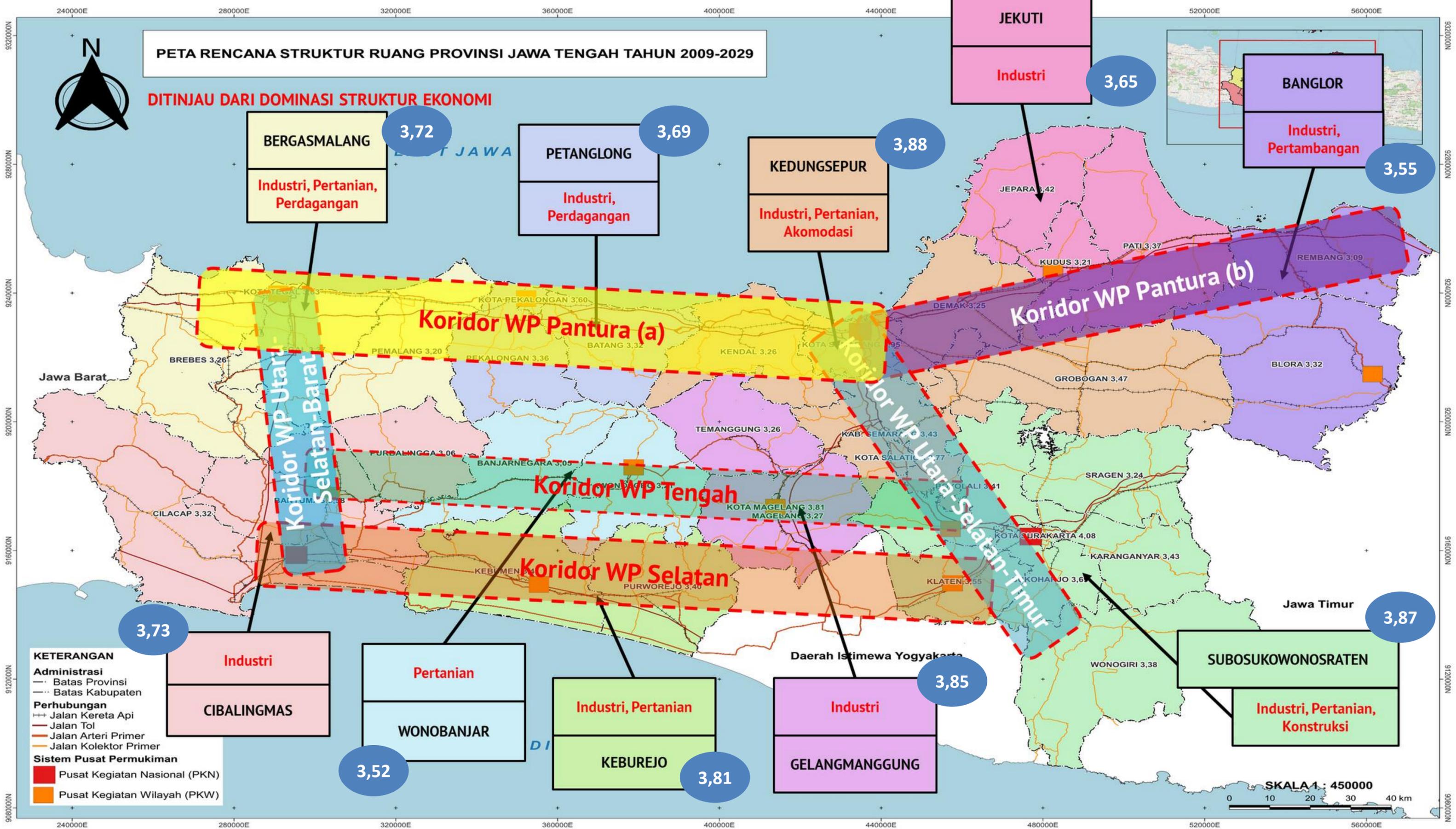
- **Rendahnya efektivitas interaksi kelembagaan antar daerah**, yang disebabkan oleh:
 - Lemahnya koordinasi lintas wilayah.
 - Fragmentasi kebijakan.
 - Minimnya insentif formal untuk kerja sama daerah.
- **Keterbatasan otoritas daerah dalam konteks desentralisasi asimetris**, di mana urusan lintas wilayah seringkali tidak tertangani secara optimal karena tidak adanya kewenangan formal maupun insentif yang memadai.
- **Ketiadaan model kelembagaan kolaboratif yang adaptif**, yang mampu mengatasi tantangan fragmentasi wilayah dan perbedaan kepentingan antar daerah.
- Tantangan perspektif dan kapasitas stakeholders Pembangunan dalam WP.

Penguatan Kelembagaan

- **Meningkatkan kapasitas kelembagaan wilayah pengembangan** → Kolaborasi antar pemerintah, swasta, & masyarakat.
- **Mendorong sinergi antar sektor** → Penguatan Badan Pengelola Wilayah
- Bentuk Kelembagaan Wilayah Pengembangan dapat berupa **Badan Aglomerasi Jawa Tengah**
- **Skema Kelembagaan yang pernah dilakukan**
 - Telah pernah ada insentif kerjasama antar daerah inisiatif kota/ kabupaten pada era tahun 2000-an, namun memiliki kendala kewenangan daerah dalam regulasi dan pelaksanaan operasionalnya
 - Telah pernah adakerjasama Bakorwil, namun yang lebih bersifat memfasilitasi fungsi layanan publik.
 - Belum ada kelembagaan Provinsi yang operasional memfasilitasi pengelolaan wilayah pengembangan secara terintegrasi mendorong kerjasama dan produktivitas sinergi antar kab/kota.
- **Kebutuhan Skema Kelembagaan**
 - **Pembentukan Badan Kelembagaan Wilayah dengan fungsi *ad hoc* yang dibentuk dengan SK gubernur, bertugas untuk:**
 - Mendorong produktivitas wilayah: Meningkatkan kolaborasi antar daerah serta mendorong efektivitas pengembangan rantai pasok produk unggulan
 - Memfasilitasi koordinasi layanan publik dalam lingkup wilayah.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2029

DITINJAU DARI DOMINASI STRUKTUR EKONOMI



Sumber : Diadopsi dari P5 UNDIP dan Brida Jawa Tengah, 2025



INDEKS DAYA SAING DAERAH DAN DIFERENSIASI TREATMENT DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) merupakan instrument pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. *mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan GCI dan WEF.

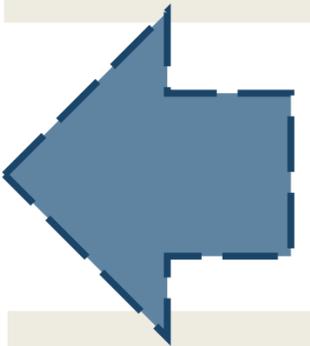
Daerah menduduki kategorisasi **Berkembang** telah memiliki capaian kinerja makro pembangunan baik sehingga **perlu didukung capaian daya saing untuk menjaga capaian berkelanjutan**

4 Indikator Makro

Daerah menduduki kategorisasi **Perlu Upaya Keras** perlu strategi dan skenario pembangunan untuk mengungkit kapasitas daya saing dan capaian indikator makro dengan **meningkatkan nilai tambah dari wilayah tersebut**

Berkembang, Tetapi Perlu Kesiapan Daya Saing	Unggulan
<p>WP 1: BREGASMALANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Brebes Pemalang Magelang <p>WP 3: KEDUNGSEPUR</p> <ul style="list-style-type: none"> Grobogan Demak <p>WP 5: BANGLOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Rembang Blora <p>WP 6: SUBOSUKOWONOSRATEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Sragen Boyolali Karanganyar <p>WP 7: GELANGMANGGUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Magelang <p>WP 8: WONOBANJAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Wonosobo Banjarnegara <p>WP 9: KEBUREJO</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebumen <p>WP 10: CIBALINGMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Purbalingga Cilacap <p>Perlu dukungan penguatan kelembagaan agar menjaga keberlanjutan capaian</p>	<p>WP 1: BREGASMALANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Kota Tegal <p>WP 2: PETANGLONG</p> <ul style="list-style-type: none"> Kota Pekalongan <p>WP 3: KEDUNGSEPUR</p> <ul style="list-style-type: none"> Kota Semarang Semarang Kota Salatiga <p>WP 6: SUBOSUKOWONOSRATEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Surakarta Sukoharjo <p>WP 7: GELANGMANGGUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Kota Magelang <p>Daerah yang perlu diversifikasi strategi pembiayaan inovatif</p>
Perlu Upaya Keras	Potensial Karena IDSD Tinggi, Namun Capaian Indikator Pembangunan Masih Rendah
<p>WP 1: BREGASMALANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Tegal <p>WP 2: PETANGLONG</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekalongan Batang <p>WP 3: KEDUNGSEPUR</p> <ul style="list-style-type: none"> Kendal <p>WP 4: JEKUTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Jejara Pati Kudus <p>WP 7: GELANGMANGGUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Temanggung <p>Daerah afirmasi yang perlu dukungan provinsi untuk fasilitasi KSDD dengan Daerah Unggulan dalam WP dan pengaturan pola kerjasama</p>	<p>WP 6: SUBOSUKOWONOSRATEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Wonogiri Klaten <p>WP 9: KEBUREJO</p> <ul style="list-style-type: none"> Purworejo <p>WP 10: CIBALINGMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Banyumas <p>Perlu arah pencapaian KPI secara kolektif dalam kesatuan fungsi aglomerasi</p>

Daerah menduduki kategorisasi **Unggulan** memiliki kapasitas menjadi stimulant pendorong pembangunan daerah **secara mandiri dan mampu memiliki kapasitas berbagi dengan wilayah sekitar**



Daerah menduduki kategorisasi **Potensial** memiliki modal dasar dalam daya saing daerah namun perlu waktu untuk menerapkan dalam capaian indikator makro pembangunan

Indeks Daya Saing



KERJASAMA DAERAH



PP 28 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 2 atau lebih daerah yang berbatasan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama merupakan **Kerja Sama Wajib**

Koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk kerja sama yang dilakukan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi



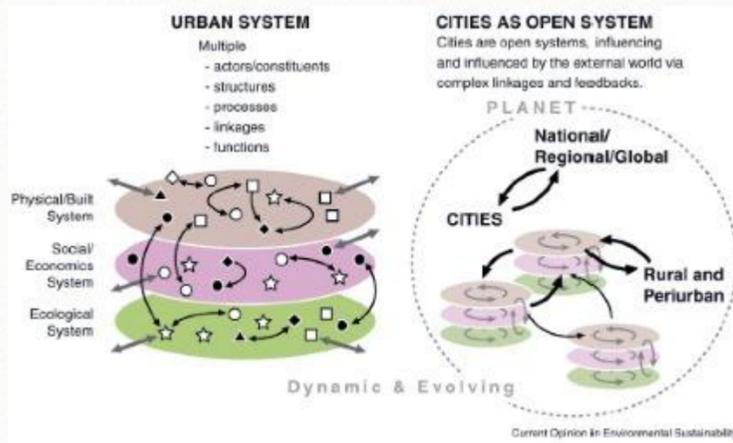
PP 59 2022 tentang Perkotaan

Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan pada kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan langsung dilakukan melalui **kerja sama antardaerah**

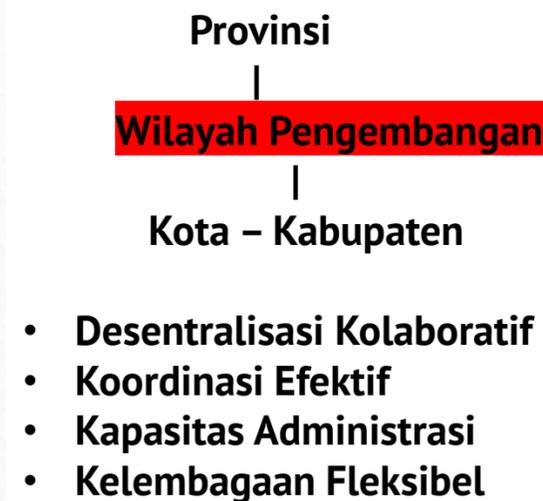
Kerja sama penyelenggaraan pengelolaan perkotaan pada kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan langsung **dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**



BENTUK KELEMBAGAAN DAN PELUANG PEMBIAYAAN INOVATIF



Tata Kelola Pemerintahan Multilevel (Multilevel Governance):



Kemanfaatan dan Kepentingan Bersama dalam Wilayah

- Sinergi Produktivitas Wilayah (rantai pasok)
- Pelayanan Publik Wilayah

- Pembiayaan inovatif:**
1. *Land value capture*
 2. Transportasi dan logistik regional
 3. Sarana dan Prasarana Wilayah:
 - Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional
 - TPA Regional
 - Pengelolaan DAS
 - Pengelolaan area hutan
 - Pengelolaan RTH Bersama
 - Pengelolaan Pesisir Terpadu



REFERENSI PEMBANDING SKEMA KELEMBAGAAN CEKUNGAN BANDUNG & REBANA

Tujuan :

- Perekonomian dan pembangunan daerah
- Sinergi peran dalam pelayanan yang bersifat lintas wilayah administratif, lintas fungsi dan lintas dampak.

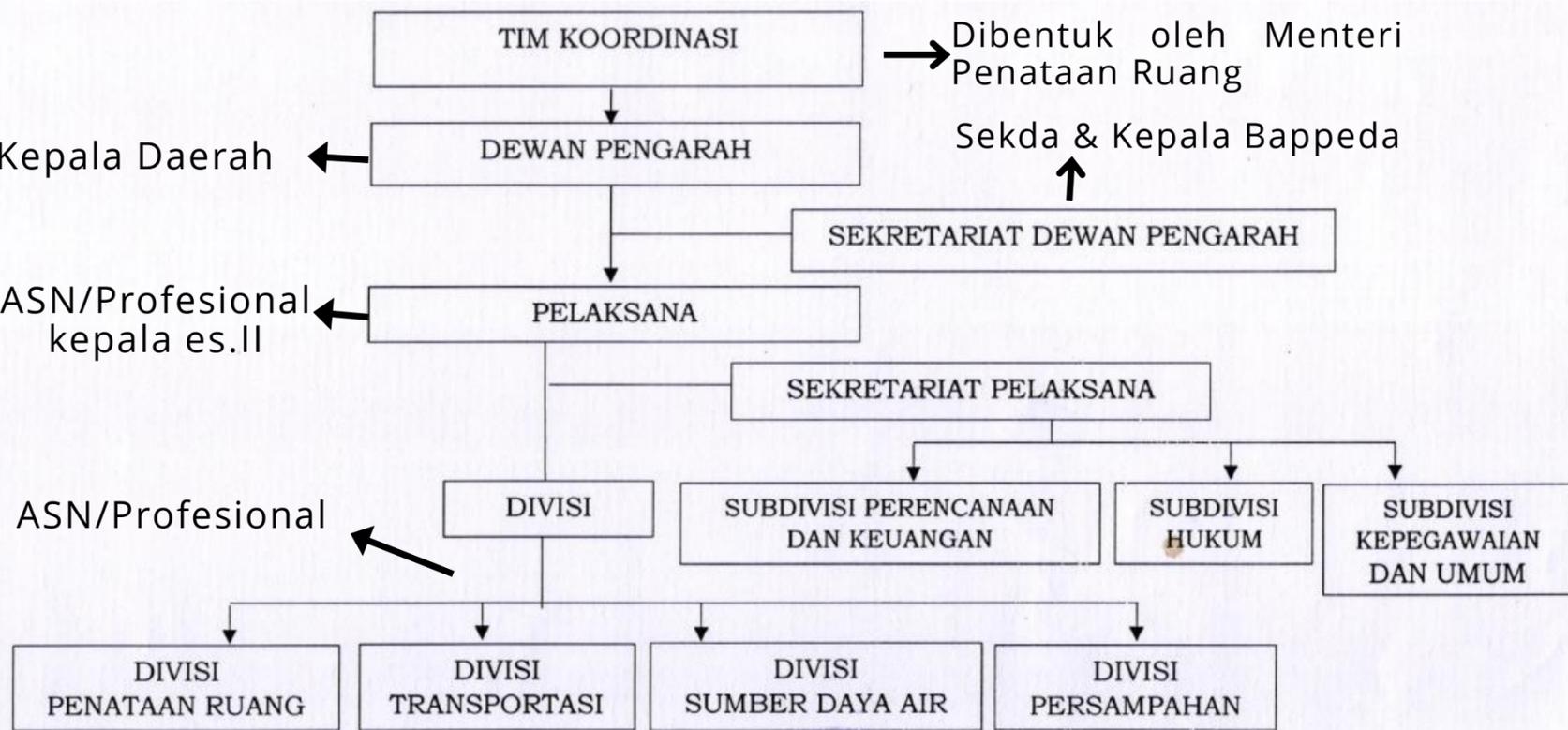
Cekungan Bandung:

Menyelenggarakan pemenuhan layanan bidang SDA, Transportasi, Persampahan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Penataan Ruang

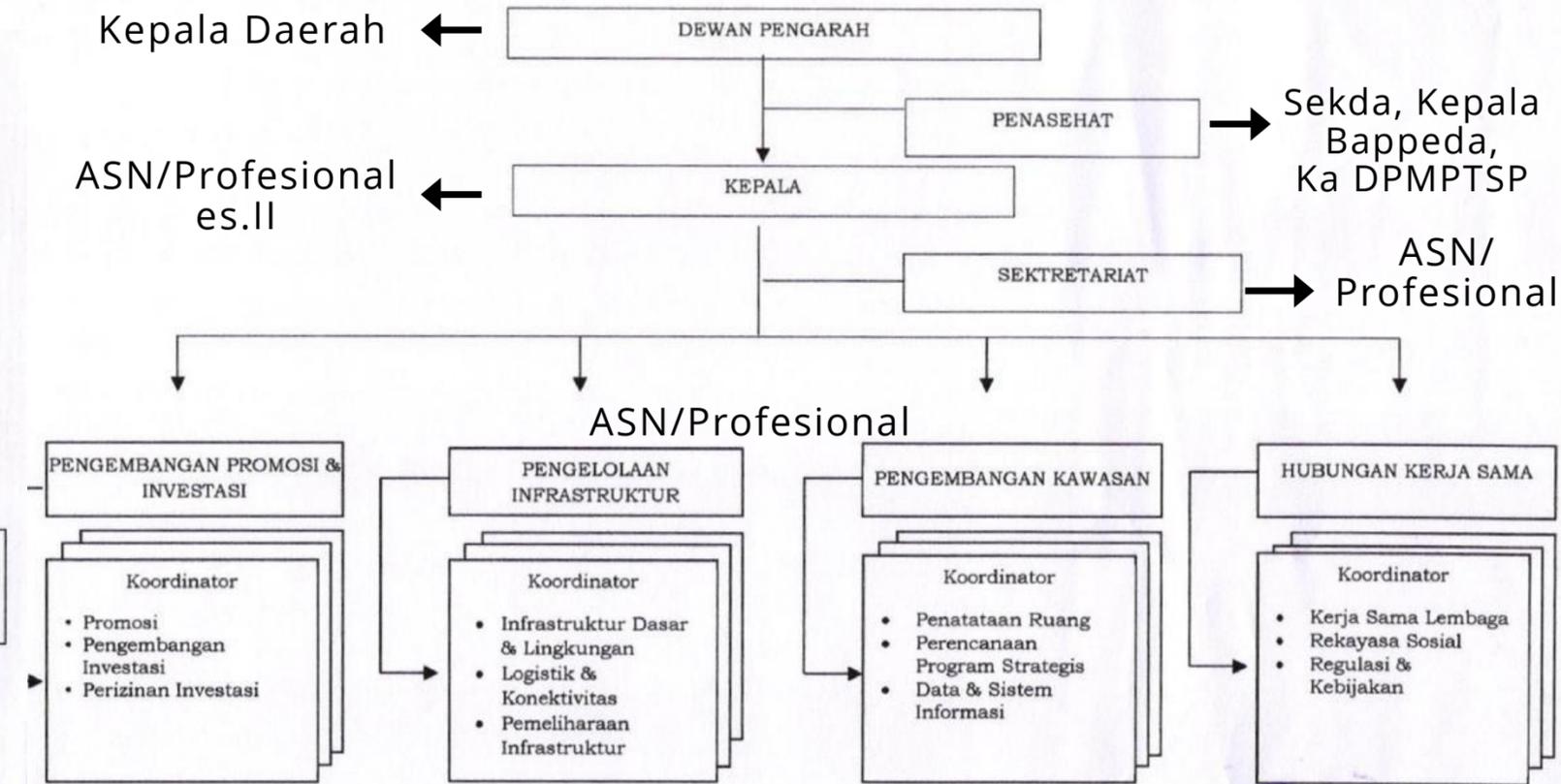
Rebana

Menyelenggarakan Promosi dan investasi, Pengembangan kawasan, Infrastruktur, dan Upaya percepatan investasi lainnya

Cekungan Bandung



Rebana

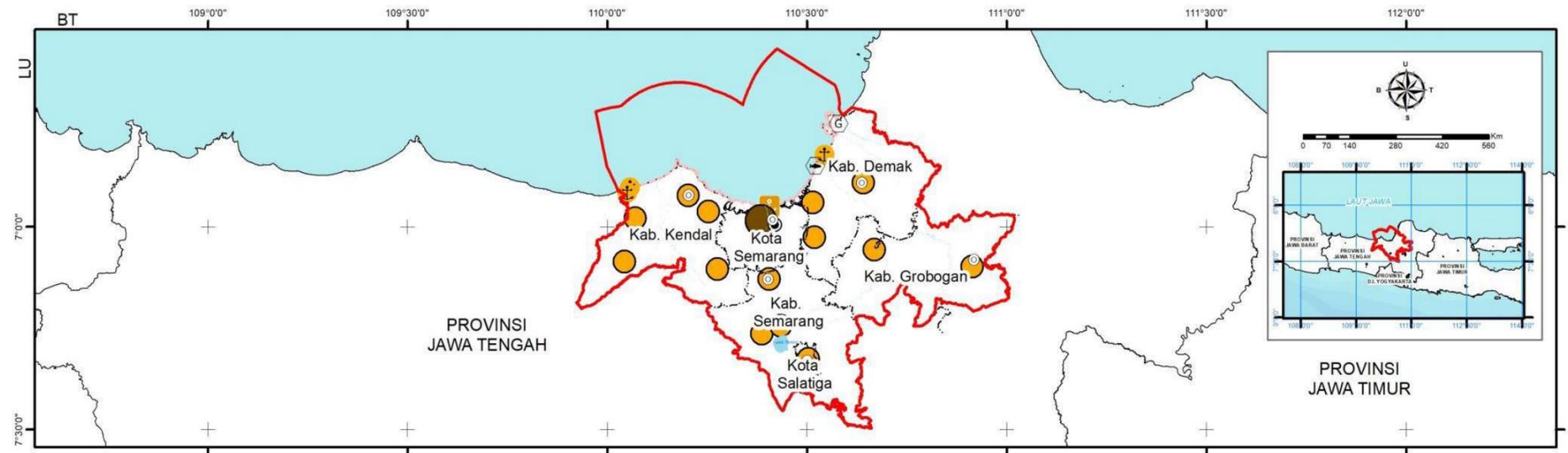




Transportasi Regional :

Integrasi antar moda dengan Trans Jateng berpotensi mendukung layanan metropolitan Semarang, dalam hal ini aglomerasi Kedungsepur

Aglomerasi Kedungsepur adalah wilayah metropolitan di Provinsi Jawa dengan Kota Semarang sebagai kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya merupakan kawasan penyangga meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga, Kota Purwodadi.



Dasar Hukum Aglomerasi Kedungsepur

Regulasi	Rincian
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Kawasan Kedungsepur ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berbentuk Kawasan metropolitan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi	Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepurr bertujuan sebagai Kawasan pusat kegiatan ekonomi berskala internasional berbasis: <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan barang/jasa b. Industri maritim dan jasa maritim c. Sumber daya kelautan d. Pariwisata dan ekonomi kreatif

Transportasi Regional :

Layanan transportasi umum Kedungsepur: informasi umum, pengelola, dan integrasinya dengan BRT Semarang

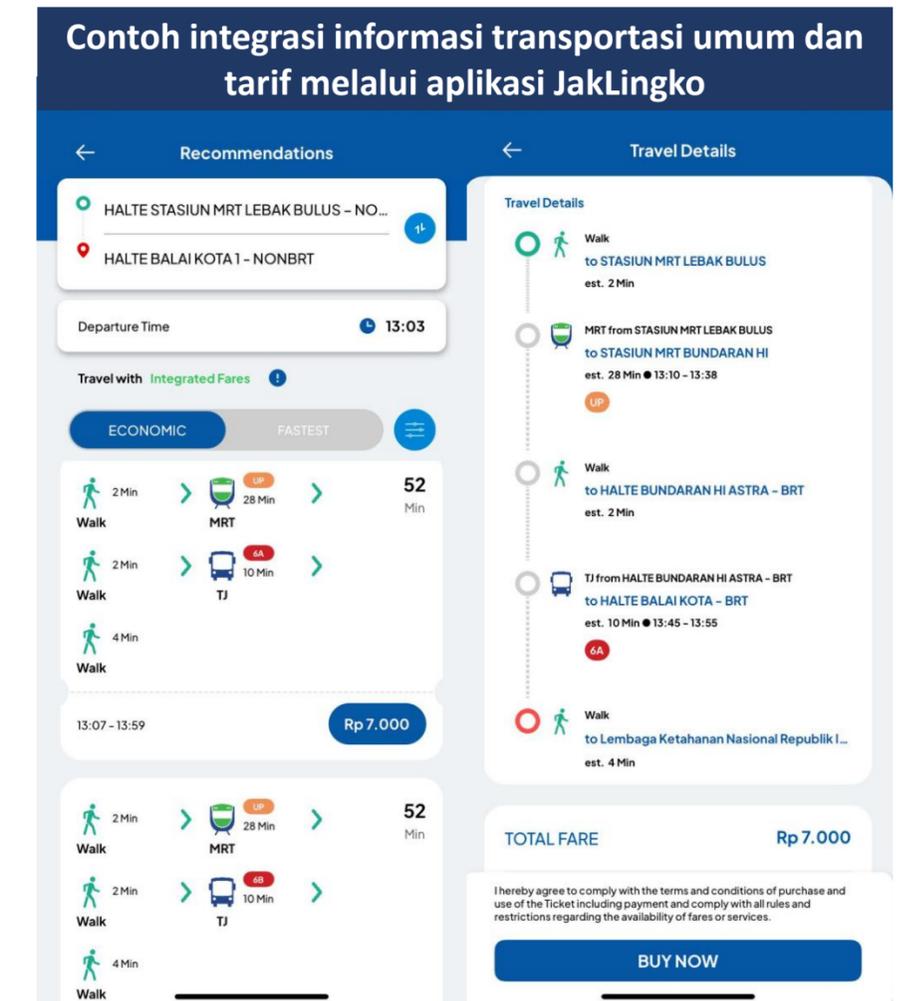
No.	Layanan	Moda Transportasi	Rincian	Pengelola	Wilayah Layanan		Integrasi dengan BRT	
					Kota Semarang	Aglomerasi Kedungsepur		
1	Trans Semarang 	Bus	Sistem bus transit di Kota Semarang dan sebagian Kabupaten Semarang untuk mengurangi kemacetan dan memfasilitasi komuter menuju pusat kota dan tujuan wisata.	8 koridor utama 1 koridor khusus	BLU UPTD Trans Semarang	✓	✓	Ya
2	Feeder Trans Semarang 	Mikro Bus	Layanan yang dioperasikan oleh BLU UPTD Trans Semarang di Kota Semarang berfungsi sebagai pengumpan (<i>feeder</i>) ke layanan BRT di koridor utama.	4 koridor	BLU UPTD Trans Semarang	✓	✓	Ya
3	Trans Jateng 	Bus	Trans Jateng adalah sistem bus raya terpadu milik Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah, melayani wilayah Jawa Tengah dan beroperasi berdasarkan aglomerasi perkotaan.	7 koridor	Dinas Perhubungan Prov Jateng	✓	✓	Ya
4	DAMRI di Semarang 	Bus	Salah satu transportasi untuk masyarakat yang ingin bepergian atau berwisata di luar Kota Semarang.	6 rute dalam kota 1 rute aglomerasi	PT. DAMRI	✓	✓	Tidak
5	Bus Wisata 	Bus	Layanan transportasi umum untuk wisata keliling kota Semarang secara gratis	1 rute 3 bus	Dinas Perhubungan Kota Semarang	✓		Tidak
6	KA Komuter Kedungsepur 	Kereta	Layanan kereta yang melewati Kawasan kedungsepur	Semarang Poncol - Ngrombo	PT. KAI	✓	✓	Ya
7	Angkutan Penumpang (Angkot) 	Mikro Bus	Layanan transportasi umum penghubung yang mengantarkan penumpang dari titik pemberhentian hingga ke area permukiman	26 rute, 479 pemberhentian	Dinas Perhubungan Kota Semarang	✓	✓	Tidak



Transportasi Regional :

Kota Semarang dan kota lainnya dalam aglomerasi Kedungsepur dapat mengadopsi konsep integrasi moda transportasi di DKI Jakarta

- Mekanisme penggabungan sistem pengelolaan transportasi umum di Aglomerasi Kedungsepur dan Kota Semarang dapat dilakukan melalui kerja sama antar pengelola untuk mengintegrasikan tarif, sistem pembayaran, dan sistem informasi (aplikasi) kepada para pengguna.
- Integrasi pengelolaan multi-sistem transportasi umum memiliki beberapa kelebihan.
 - Menghindari potensi *interface* dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan pengelola transportasi umum lainnya di Aglomerasi Kedungsepur karena sudah berada dalam satu sistem.
 - Masyarakat **pengguna multisarana transportasi umum** lebih mudah mengakses informasi layanan transportasi umum dan pembayaran tarif melalui aplikasi karena telah **terintegrasikan dalam satu sistem pembayaran**.
- Sebagai contoh → integrasi moda pada aglomerasi Jabodetabek telah menjadi kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada pemerintah pusat dan integrasi moda di dalam Provinsi DKI Jakarta telah menjadi kewenangan JakLingko
 - BPTJ**: unit organisasi pada Kemenhub yang bertugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek
 - JakLingko** : sistem integrasi transportasi publik di Jakarta yang mencakup bus TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL



Sebuah institusi (dapat sebagai BUMD atau bentuk lainnya yang berada pada tingkat provinsi) perlu menjadi integrator dalam mengelola moda transportasi di aglomerasi Kedungsepur pada aspek yang mencakup namun tidak terbatas pada: 1) informasi layanan; 2) jadwal perjalanan; dan 3) tarif

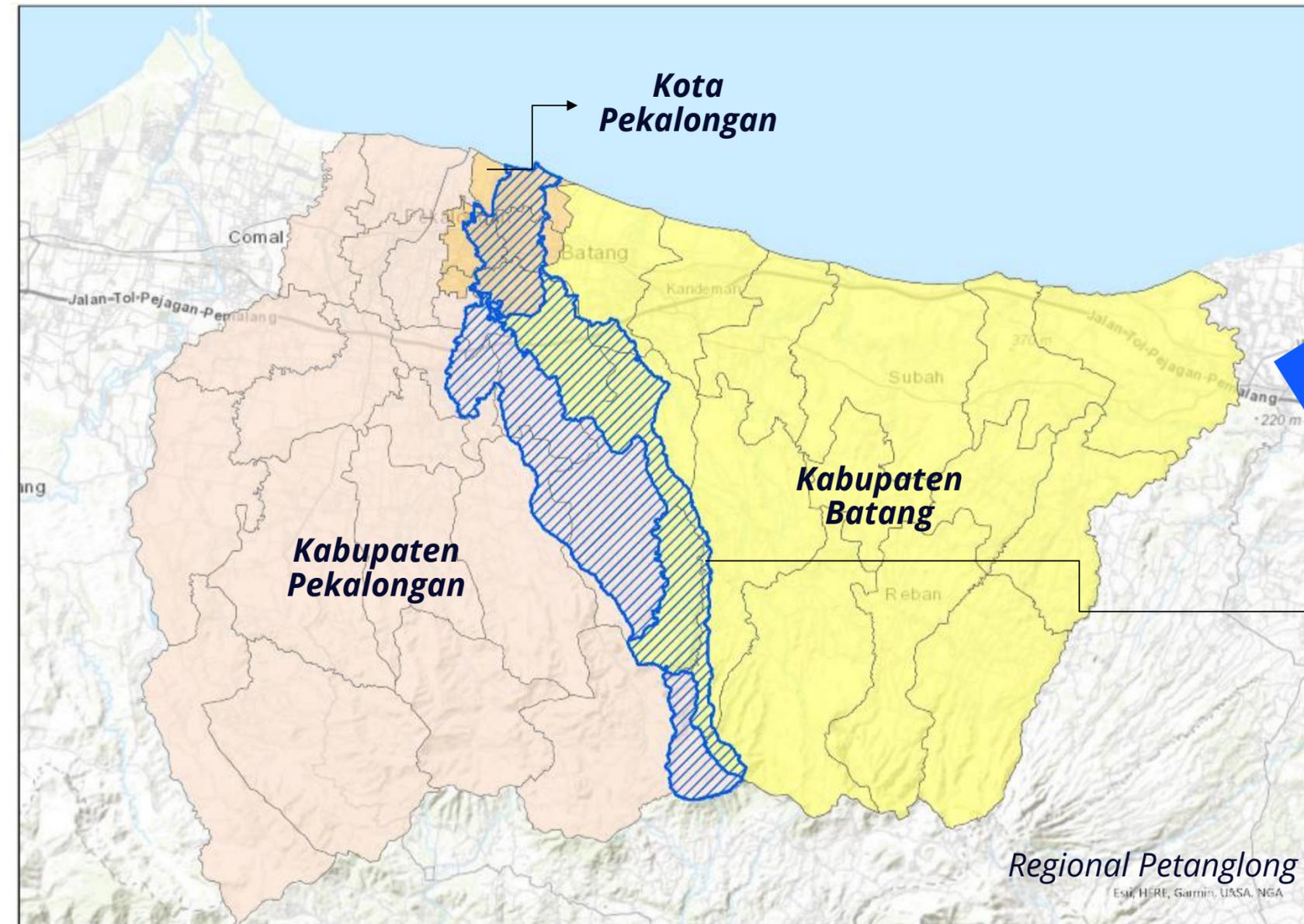




SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL

DAS KUPANG – REGIONAL PETANGLONG

Sumber : Mercy Corps Indonesia, 2022.



DAS KUPANG
Merupakan lokasi yang
menjadi fokus area
pekerjaan Pra Kajian
Kelayakan SPAM Regional
Petanglong

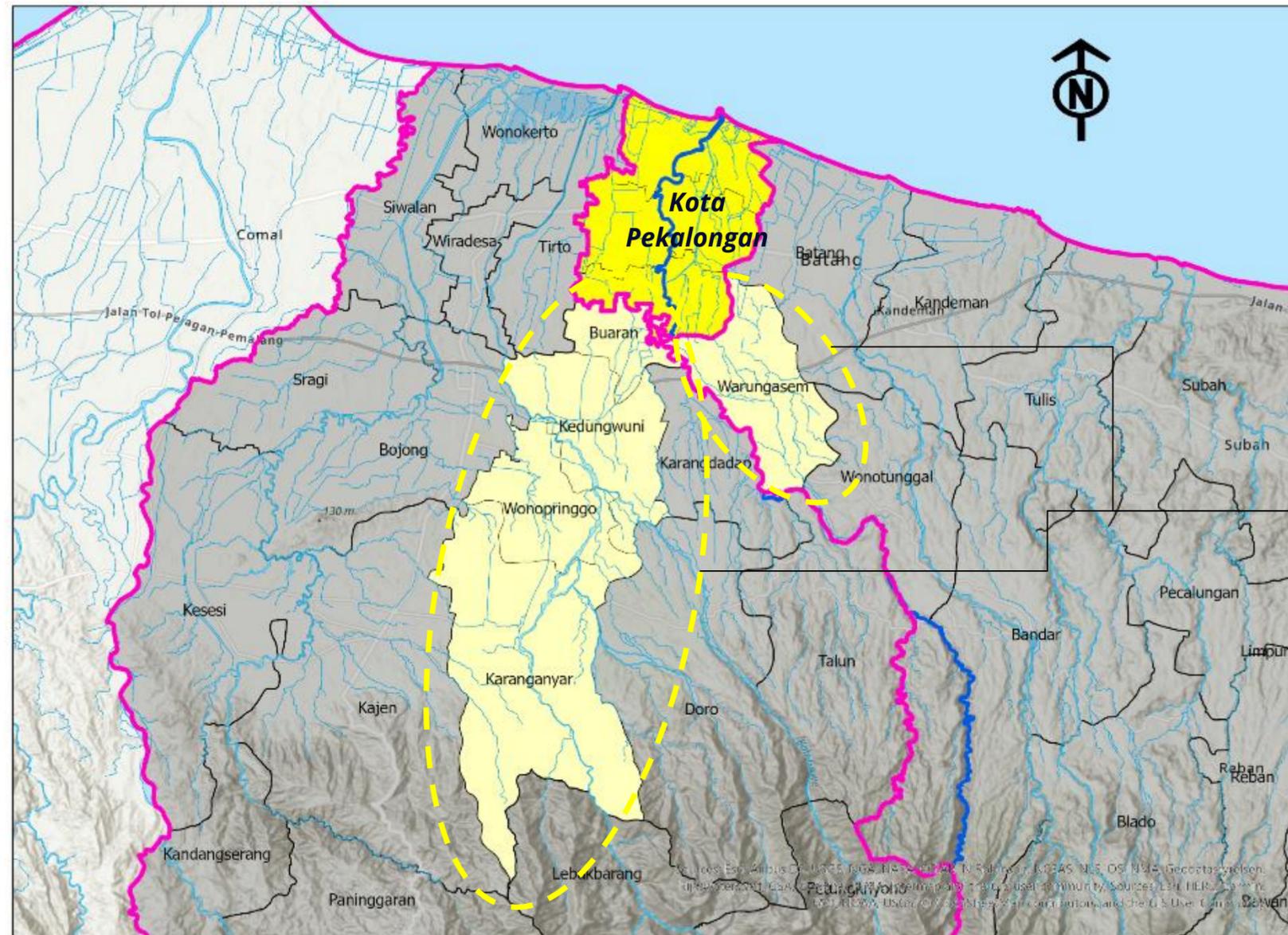
RUANG LINGKUP WILAYAH

Lokasi pekerjaan merupakan satu kesatuan wilayah DAS Kupang. Sebagian besar DAS Kupang berada di Regional Petanglong yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. DAS Kupang memiliki sungai utamanya yaitu Sungai Kupang.



PDAM KOTA PEKALONGAN

Cakupan Wilayah Pelayanan



Jumlah penduduk yang terlayani sebanyak **183.0658 jiwa** atau **60,84%** dari jumlah penduduk administrasi maupun wilayah teknis PDAM sebanyak 301.870 jiwa.

Wilayah Pelayanan di Luar Administrasi Kota Pekalongan

Kabupaten Pekalongan (1.540 pelanggan) :

1. Kecamatan Karanganyar
2. Kecamatan Wonopringgo
3. Kecamatan Kedungwuni
4. Kecamatan Buaran

Kabupaten Batang (71 pelanggan)
Kecamatan Warungasem

PDAM Kota Pekalongan selain melayani penduduk di wilayah administrasi Kota Pekalongan **juga melayani penduduk wilayah Kabupaten Pekalongan** yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Buaran sebanyak 1.540 pelanggan **dan Kabupaten Batang** sebanyak 71 pelanggan di Kecamatan Warungasem sehingga total 1.611 pelanggan atau 6,06% dari pelanggan aktif sebanyak 26.569 pelanggan

Sumber : Mercy Corps Indonesia, 2022.

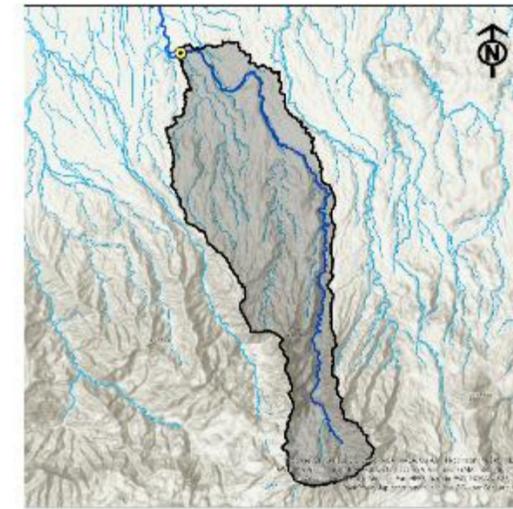
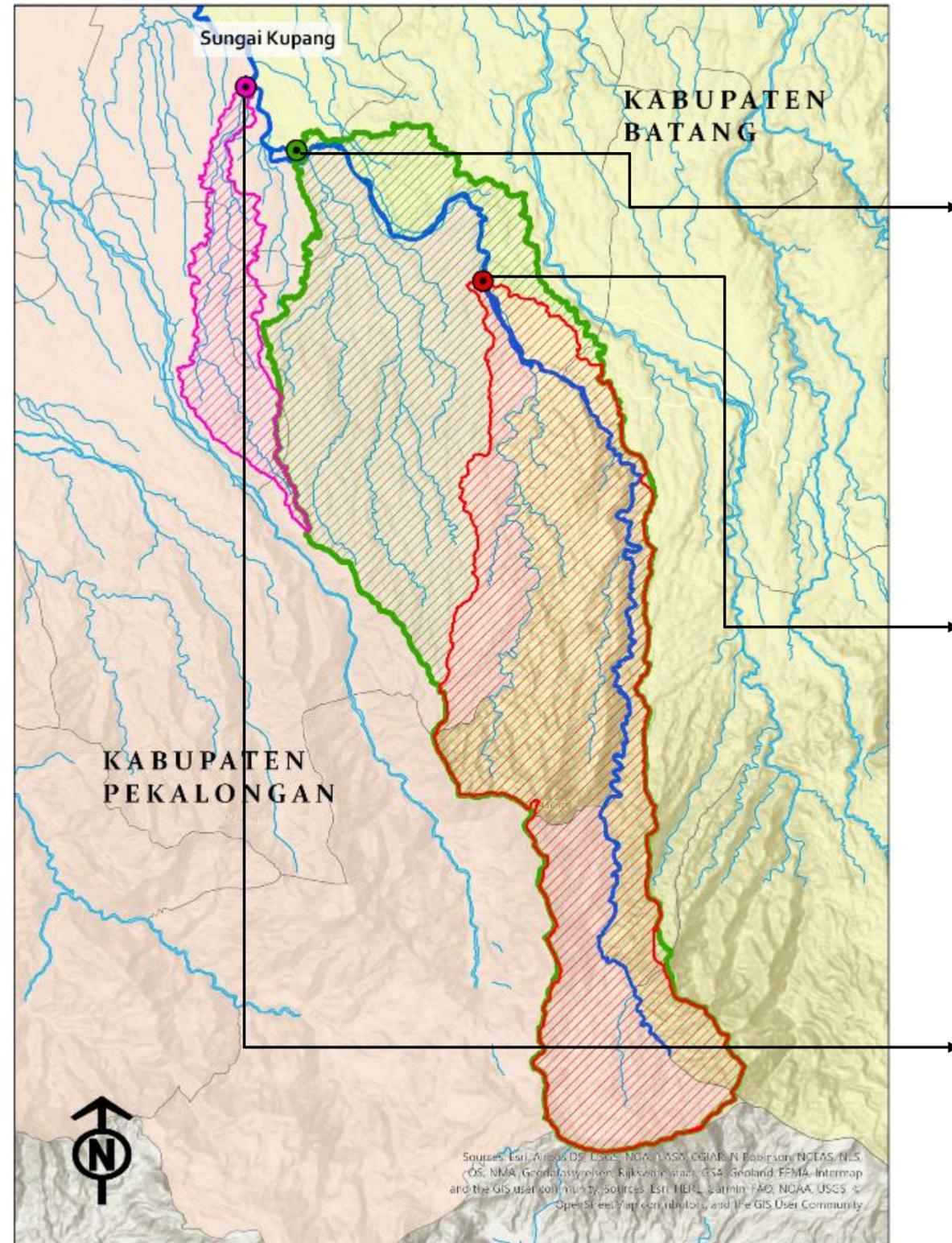




SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL: ALTERNATIF LOKASI POTENSI

**Terdapat 3 Alternatif
Lokasi Potensi untuk
Pembangunan Waduk**

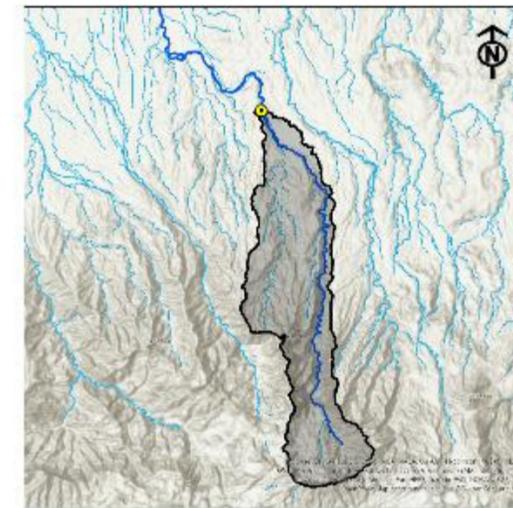
Sumber : Mercy Corps Indonesia, 2022.



Lokasi Potensial 1

Luas Catchment :
102,6 km²

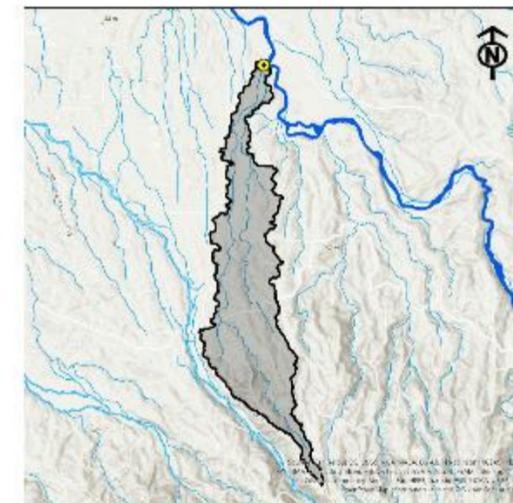
Lokasi Sungai :
Sungai Utama Kupang



Lokasi Potensial 2

Luas Catchment :
59,8 km²

Lokasi Sungai :
Sungai Kupang &
Sumilir



Lokasi Potensial 3

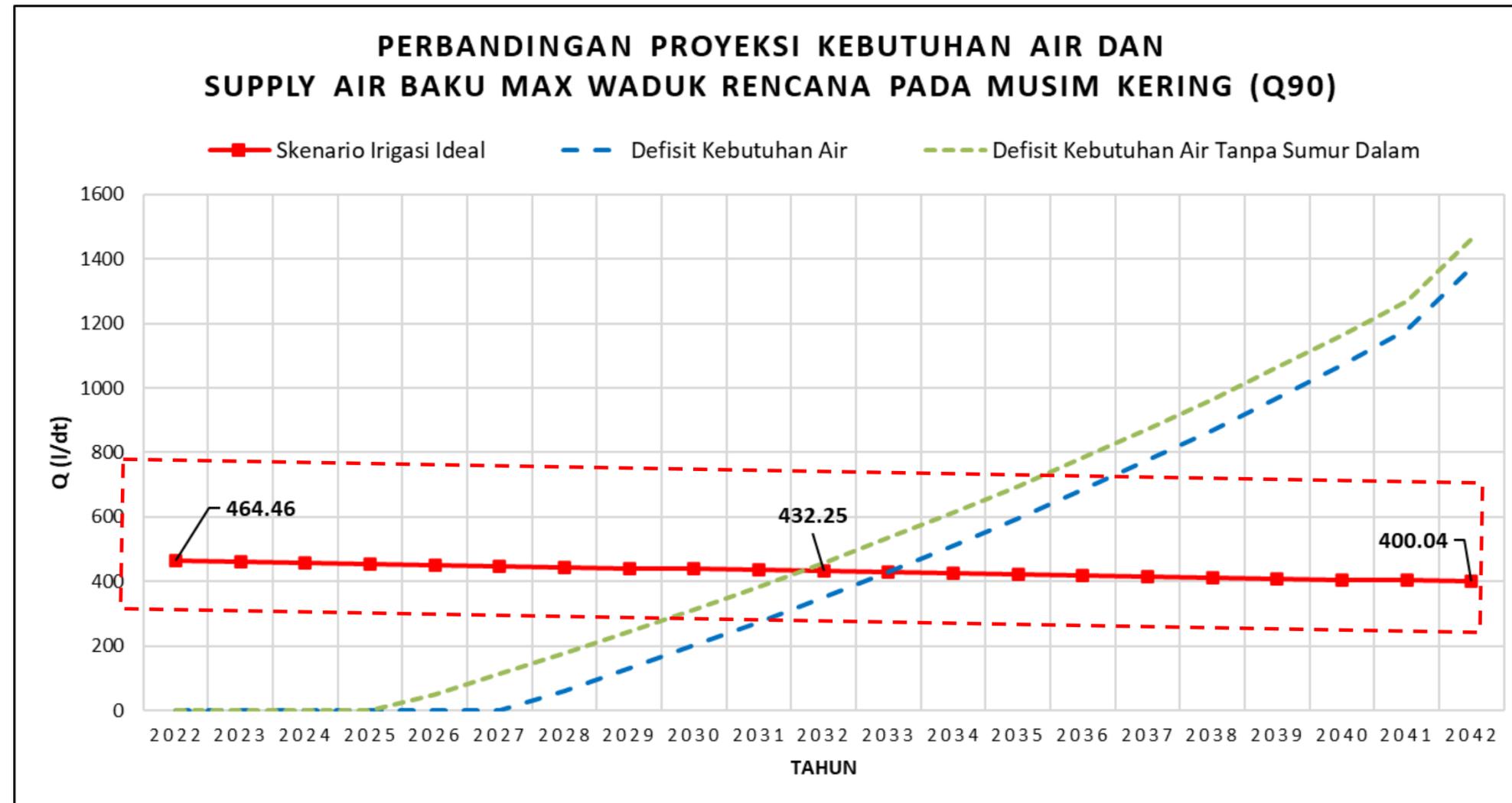
Luas Catchment :
9,6 km²

Lokasi Sungai :
Anak Sungai Sogo



SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL

Potensi Air Baku Waduk Rencana



Berdasarkan perhitungan analisa hidrologi Potensi air baku yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih paling rendah berada pada tahun 2042 sebesar 400,04 liter/detik. Berdasarkan data tersebut maka potensi air baku yang dapat di manfaatkan maksimal sebesar **350 liter/detik** dengan perkiraan kebutuhan air untuk operasional dan pemeliharaan IPA sebesar 10% dari kapasitas produksi maka Q yang dapat di ambil dari waduk rata-rata sebesar **385 liter/detik**



RTH BERSAMA :

Contoh Kasus Optimalisasi *Jointly Acclaimed* RTH-RTB di Jabodetabekpunjur

Tujuan RTRW:

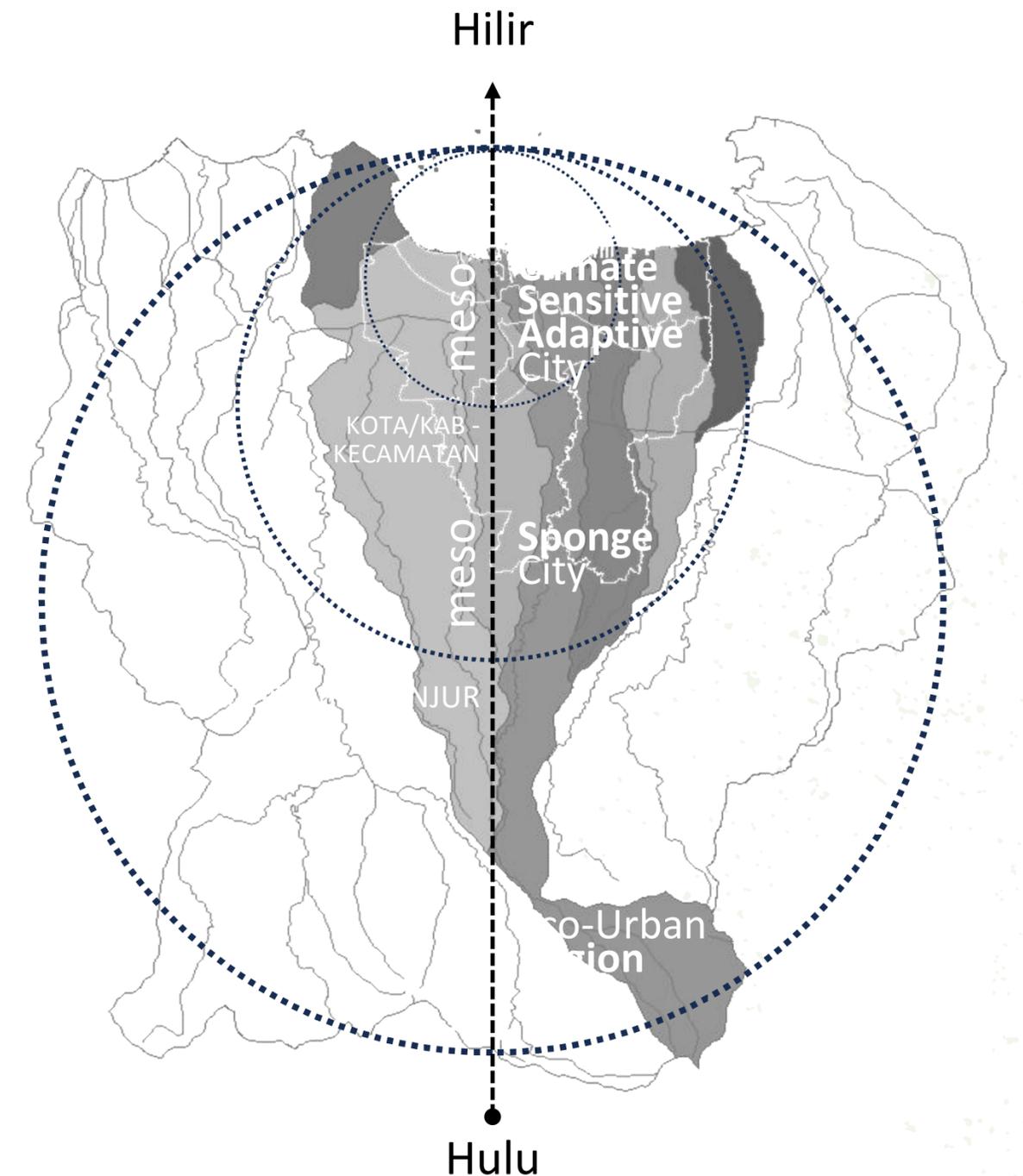
Terwujudnya ruang dan pelayanan kota yang **berketahanan (RESILIENCE)** dan **terintegrasi (INTEGRATED)** dengan wilayah sekitar **BODETABEKPUNJUR**.

1. Perwujudan **KOTA HIJAU** yang berkontribusi terhadap penanganan **PERUBAHAN IKLIM** untuk mencapai pengurangan **GRK 30%** dari basis 2020 → Target 30% di 2030; *Net Zero Emission* di 2050
2. Perwujudan **WATER ADAPTIVE CITY** yang bebas **BANJIR** dan berbasis pelestarian sumber daya air dan kerja sama antar daerah **BODETABEKPUNJUR**.

DAYA DUKUNG

- **DAYA DUKUNG LINGKUNGAN** tetap menjadi pertimbangan prioritas pembangunan Kota Jakarta → ambang hak membangun maksimal.
- Konteks kebencanaan menjadi orientasi penilaian daya dukung: **BANJIR** dan dampak **PERUBAHAN IKLIM**; melalui **MITIGASI & ADAPTASI**.
- **PENYEDIAAN RTH-RTB** sebagai salah satu upaya **mitigasi**.
- Mitigasi bencana mempertimbangkan pendekatan lanskap multiskala:
 - Skala **MAKRO** : **Eco-Urban Region; Urban Green System – Landscape Scale**
 - Skala **MESO** : **Sponge City; Nature Based Solution – City Scale**
 - Skala **MIKRO** : **Water Sensitive/Adaptive City; Cool Space; LID – Site Scale**

KAWASAN DAN KOTA JAKARTA



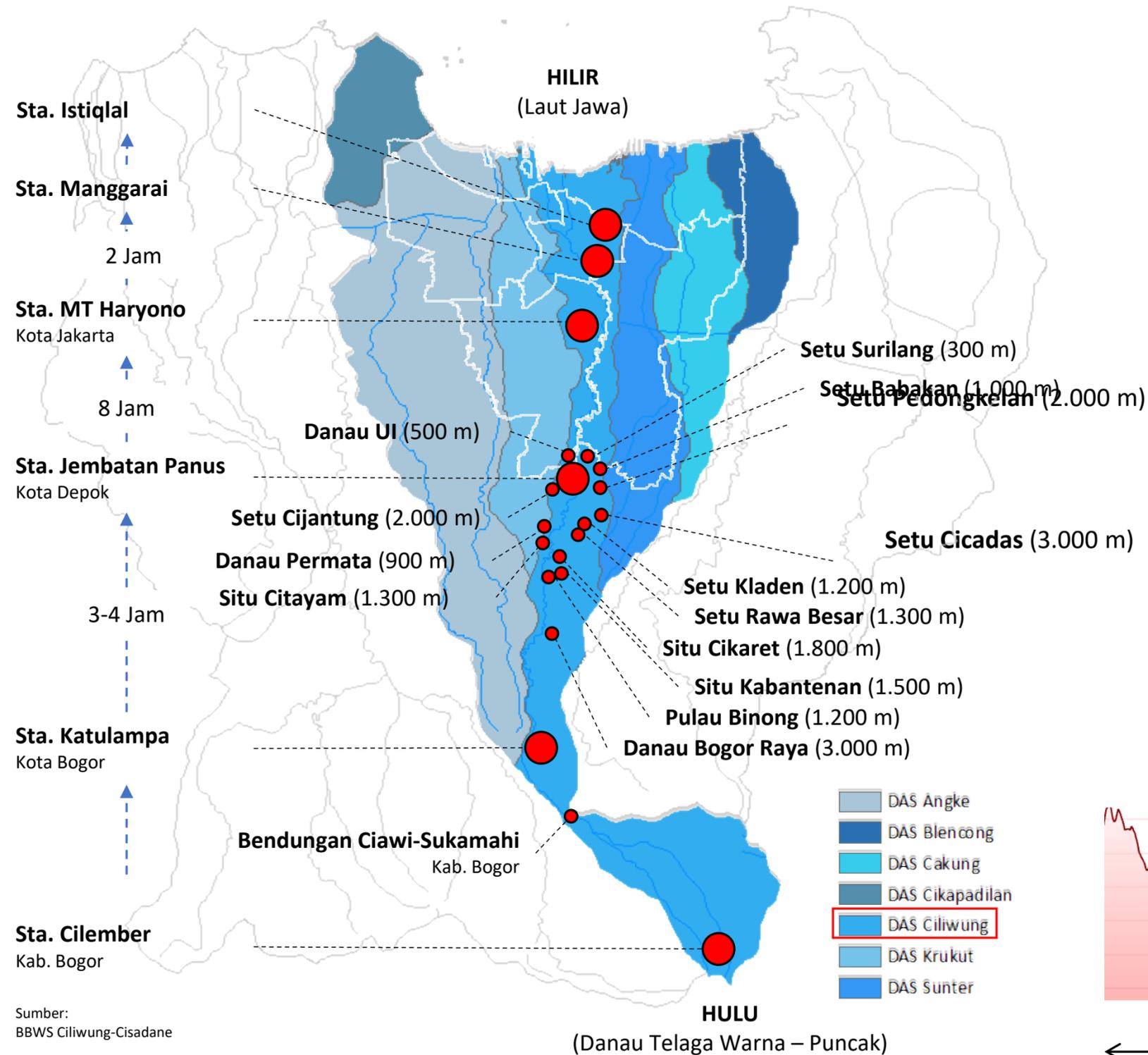
**METRO/URBAN GREEN-BLUE NETWORK
JAKARTA ECO-URBAN REGION**





RTH BERSAMA :

Contoh Kasus Optimalisasi *Jointly Acclaimed* RTH-RTB di Jabodetabekpunjur



SKEMA JOINTLY CLAIMED

Landasan Hukum: Perpres No. 60 Tahun 2020
 JABODETABEKPUNJUR → Minimal 30% RTH

JAKARTA – KAB. BOGOR

Pemanfaatan dan pengelolaan bersama:

1. Bendungan Ciawi-Sukamahi
2. Kawasan Hulu Sungai Ciliwung
3. Kawasan Sungai Ciliwung
4. Kawasan Danau/Situ

JAKARTA – KOTA BOGOR

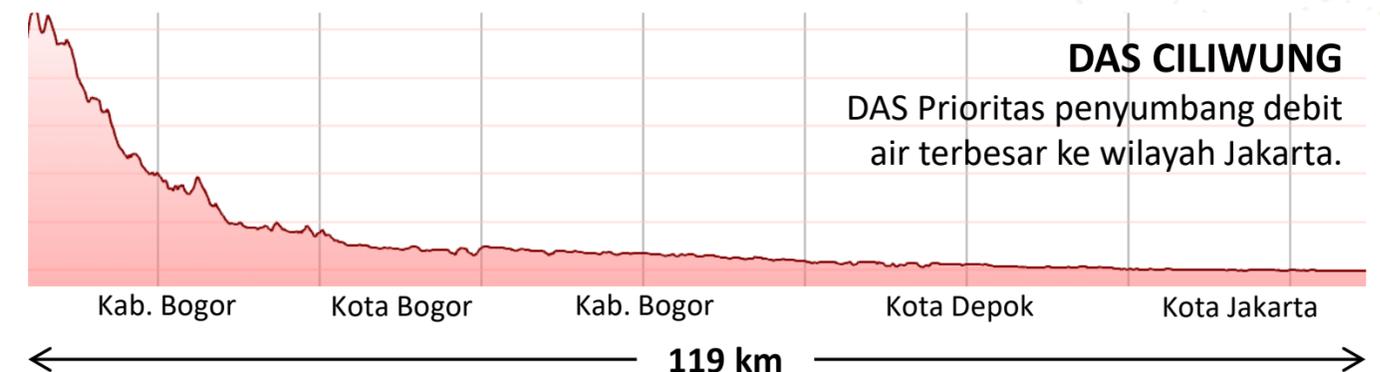
Pemanfaatan dan pengelolaan bersama:

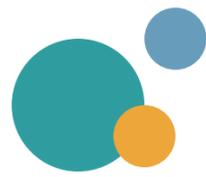
1. Kawasan Sungai Ciliwung

JAKARTA – KOTA DEPOK

Pemanfaatan dan pengelolaan bersama:

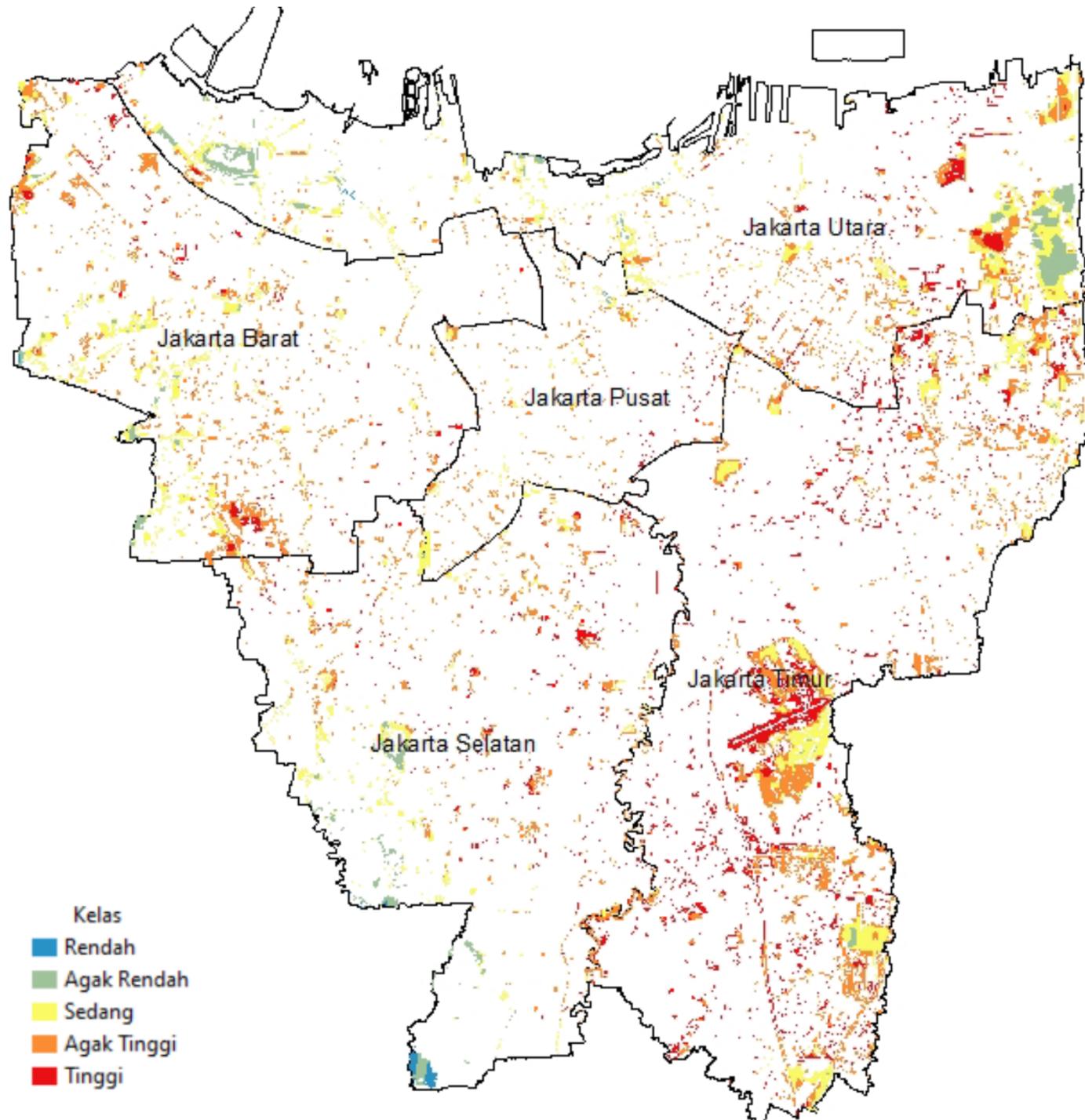
1. Kawasan Sungai Ciliwung
2. Kawasan Danau/Situ





RTH BERSAMA :

Contoh Kasus Optimalisasi *Jointly Acclaimed* RTH-RTB di Jabodetabekpunjur



ARAHAN LOKASI PRIORITAS PENYEDIAAN RTH-RTB BERDASARKAN POTENSI BENCANA DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (LST)

POTENSI KETERSEDIAAN LAHAN RTH DI **PROVINSI DKI JAKARTA**

Kelas Temperatur	Luas Area (ha)				
	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Utara
Rendah	0,71	0,32	33,44	-	2,00
Agak Rendah	47,52	3,92	112,32	21,79	317,48
Sedang	405,96	113,20	191,31	518,40	479,56
Agak Tinggi	871,01	130,06	322,42	1.188,70	311,40
Tinggi	485,71	45,83	37,37	596,67	1.233,30
TOTAL	1.810,91	293,33	696,86	2.325,56	2.343,74

7.470,40 ha

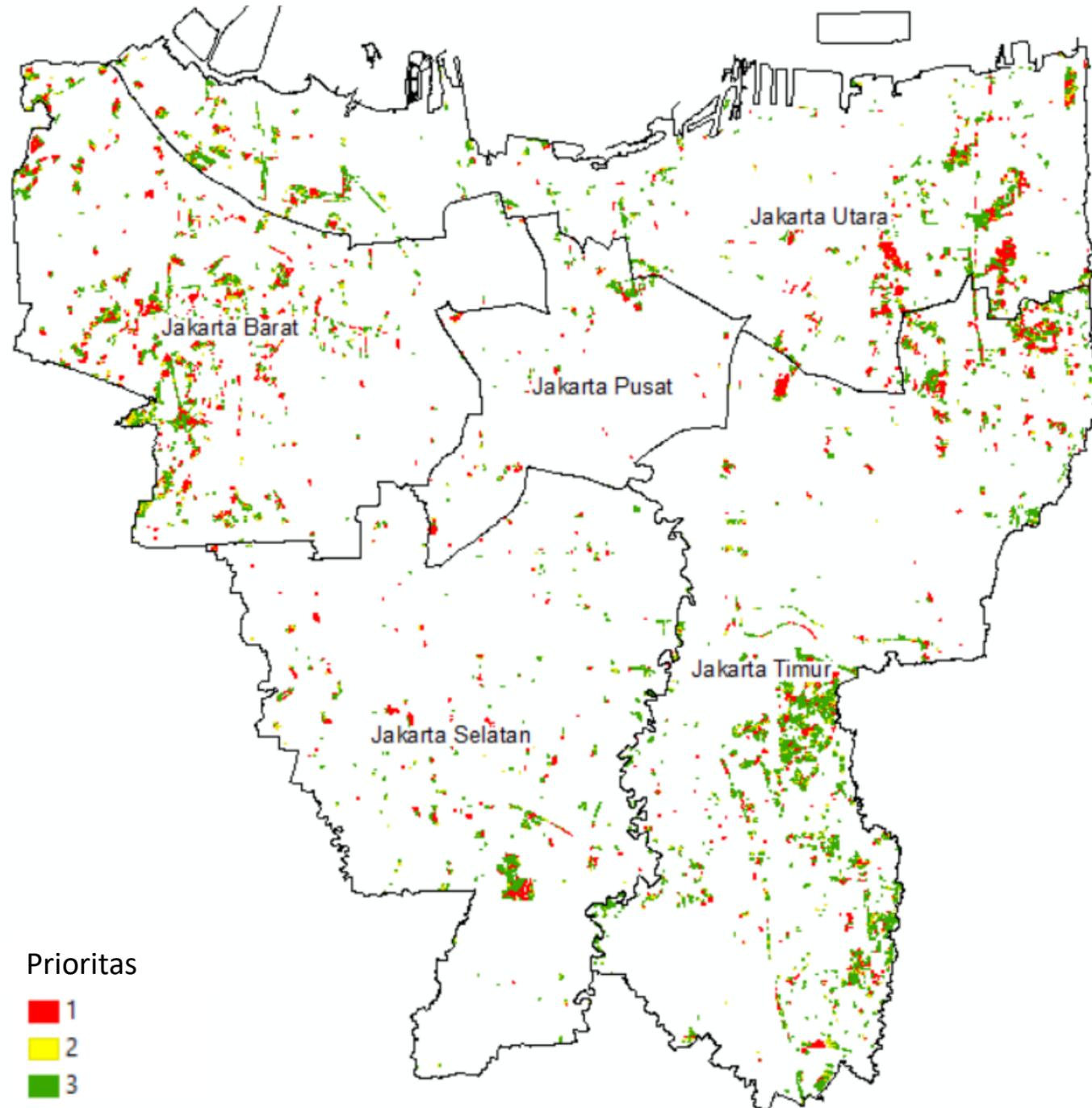
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI, 2023.





RTH BERSAMA :

Contoh Kasus Optimalisasi *Jointly Acclaimed* RTH-RTB di Jabodetabekpunjur



ARAHAN LOKASI PRIORITAS PENYEDIAAN RTH-RTB BERDASARKAN POTENSI BENCANA BANJIR DAN GENANGAN

POTENSI KETERSEDIAAN LAHAN RTH DI **PROVINSI DKI JAKARTA**

Kota	Luas Potensi Lahan RTH Prioritas 1 (m ²)	Luas Potensi Lahan RTH Prioritas 2 (m ²)	Luas Potensi Lahan RTH Prioritas 3 (m ²)	
Jakarta Barat	1.230.250	675.323	1.285.827	319,14 ha
Jakarta Pusat	94.168	37.003	119.238	25,04 ha
Jakarta Selatan	370.062	201.577	636.300	120,79 ha
Jakarta Timur	1.297.029	1.027.081	2.987.270	531,14 ha
Jakarta Utara	961.091	645.347	1.579.451	318,59 ha
TOTAL	3.952.600	2.586.331	6.608.086	1.314,70 ha

392,60 ha

258,63 ha

660.80 ha

1.314,70 ha

1,98%

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI, 2023.



01

Perlu orkestrasi dan dorongan provinsi dalam memperkuat pembangunan berbasis regional (pencapaian Indikator secara kewilayahan)

02

Perlu pengaturan pola kerja sama antar daerah dan kelembagaan (yang mutually benefit)

RPJMD

03

Perumusan legal basis skema kerja sama daerah dengan pihak ketiga (untuk penyediaan bisnis dan layanan umum berbasis regional)

04

Perlu strategi khusus dalam pengelolaan wilayah berbasis risiko (terhadap masyarakat terdampak dan masyarakat penerima manfaat)



Terimakasih

